

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad (2019). *Hukum Perusahaan di Indonesia: Suatu Tinjauan Komprehensif*, Kencana.
- Adrian Sutedi (2022). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika.
- Ali, M. R. (2023). *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Banking Safety Net*, Airlangga University Press.
- Andrian, Rinaldi & Marbun, Paulus (2021). *Tata Kelola BUMD dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Alfabeta.
- Anggadwita, G. & Anwar, I. (2020). *Hukum Perusahaan di Indonesia: Konsep dan Isu Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group.
- Apitupulu, D. R. W. (2020). *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia (Edisi Revisi)*, Pengetahuan Perbankan Indonesia.
- Arifin, Zaenal (2020). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal (2022). *Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly (2010). *Konstitusi Ekonomi*, Kompas.
- Atmosudirdjo, Prajudi (2022). *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika.
- Basrowi & Suwardi; Bogdan & Taylor (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta.
- Budiono, Tri (2011). *Hukum Perusahaan*, Griya Media.
- Budi, Teguh & Santoso, Agus (2020). *Manajemen Risiko dan Etika Korporasi*, Gadjah Mada University Press.
- Cahyadi, Sigit (2022). *Hukum Keuangan Daerah dan BUMD*, Rajawali Pers.
- Fuady, Munir (2022). *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti.

- Kasmir (2023). *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Prenada Media Group.
- Manan, Bagir (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Nasution, Bahder Johan (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju.
- Prang, Amrizal J. (2020). *Desentralisasi Asimetris Aceh*, Bandar Publishing.
- Ridwan HR (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press.
- Ridwan HR (2023). *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press.
- Wijayanti, Asri (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung.

B. Karya Ilmiah

- Suniapriy, F. G. A., & Suharno, S. (2023). "Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan Hubungannya dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata)*, 2(1), pp. 32–46.
- Kumolosari, D. T., & Sumodiningrat, A. S. (2024). "Penerapan Teori Keadilan pada Sistem Jaminan Sosial dalam Konsep Negara Kesejahteraan Sosial", *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(2), pp. 176–190.
- Arifin, M. Z., Nugraha, M., Putri, T. Y., & Ramadhan, M. S. (2024). "Membumikan Teori Negara Kesejahteraan dalam Penguatan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif", *Journal of Law and Social Society*, 1(2), pp. 29–42.
- Prasetyo, A. (2021). "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 5(1), pp. 39–54.

- Ananda, L. A. (2023). "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah", *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), pp. 179–xxx, doi: 10.29103/reusam.v10i2.9382.
- Anzani, S. R., Kristya, V. N., & Universitas Negeri Semarang (2023). "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Good Governance", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(1), pp. 196–209.
- Fuadi, A. B. (2020). "Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara", *Supremasi Hukum*, 9(2), pp. 1–19.
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto (2017). "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), pp. 601–624, doi: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art5.
- Ibad, S. (2021). "Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik", *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), pp. 306–312.
- Kurniawan, I. (2023). "Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah dalam Menerapkan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, 2(2), pp. 251–264.
- Nadir, Z. N. M., & Prasetyo, E. (2025). "Implementasi Negara Hukum Indonesia dalam Kualifikasi Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), pp. 22533–22536.
- Nainggolan, M. R. Y., Idiham, M., Assidiqi, A. F., & Dienny, F. B. (2025). "Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan dan Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Sahabar ISNU-SU*, 1(2), pp. 142–147.
- Ridwan (2003). "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum*, 10(22), pp. 27–38.
- Sirait, T. M., Khalimi, & Widjaja, L. (2025). "The Role of PTUN in Administrative Supervision of the Protection of Citizens' Rights", *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(3), pp. 487–493, doi: 10.56371/jirpl.v6i3.430.

- Ansari, M. I. (2020). "Entitas Badan Usaha Milik Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), pp. 417–436.
- Jusmadi, R. (2009). "Pelaksanaan Privatisasi BUMD di Era Otonomi Daerah dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, 16(1), pp. 114–133.
- Kusumastuti, D., & Samadi, W. M. (2019). "Perubahan Perusahaan Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Research Fair Unair*, 3(1), pp. 1–11.
- Lalu Wira Pria, S. (2021). "Position of Regional House of Parliamentary in the Establishment, Incorporation, Merger and Liquidation of Local Government Owned Company", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), pp. 168–182, doi: 10.29303/ius.v9i1.889.
- Maramis, R. A., Tumanduk, B. R. J., et al. (2023). "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Innovative: Journal of ...*, 3, pp. 3765–3771.
- Prawira, T. (2024). "Kewenangan Hukum Direksi terhadap Hutang Perseroan Terbatas", *Respublica*, 3(2), pp. 22–34.
- Putri, S. A. D., & Nelson, F. M. (2022). "Good Corporate Governance sebagai Prinsip Dasar Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat", *Jurnal Pembangunan Nagari*, 8(1), pp. 53–63.
- Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023). "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia", *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), pp. 21–30.

C. Website

- Jafar, M. (2024). *BPR Aceh Utara, Duh dari Sabee Meusampee Jadi Sabee Meupalo (Bagian Dua)*, Modus Aceh. <https://modusaceh.co/news/bpr-aceh-utara-duh-dari-sabe-meusampe-jadi-sabe-meupalo-bagian-dua/index.html>

Laras, Arlina (2024). *OJK Blak-Blakan Ungkap Biang Kerok Bank Bangkrut di Aceh*, Finansial Bisnis.

<https://finansial.bisnis.com/read/20240304/90/1746407/ojk-blak-blakan-ungkap-biang-kerok-bank-bangkrut-di-aceh>

Respati, Agustinus Ranga & Djumena, Erlangga (2024). *OJK Cabut Izin Usaha BPR Aceh Utara*, Kompas.com.

<https://money.kompas.com/read/2024/03/05/072742726/ojk-cabut-izin-usaha-bpr-aceh-utara>

Muzza, Tisyani Syaravina & Sanusi (2025). *Perlindungan Pekerja/Buruh pada Likuidasi PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara*, JIM USK.

<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/35850>

D. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Milik Pemerintah Daerah

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Aceh